



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu

2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu

Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota

Palu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 2.176.218.365.346,83
- b. Belanja Rp. 1.338.835.752.001,18 Surplus Rp. 837.382.613.345,65 c
Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 196.010.911.504,53
- Pengeluaran Rp. 322.500.000,00 Surplus Rp.
195.688.411.504,53 d. SILPA Rp. 1.033.071.024.850,18

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 24.989.556.545,03 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 2.151.228.808.801,80 b. Realisasi Rp.
2.176.218.365.346,83
- Selisih lebih Rp. 24.989.556.545,03
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.1.008.081.468.305,15) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja	setelah	Perubahan	Rp.
	2.346.917.220.306,33			
b.	Realisasi		<u>Rp. 1.338.835.752.001,18</u>	
	Selisih kurang		(Rp. 1.008.081.468.305,15)	
(3)	Selisih Anggaran dengan Realisasi	Surplus/defisit	sejumlah	
	Rp.1.033.071.024.850,18	dengan rincian	sebagai berikut:	
a.	Surplus / defisit	setelah	Perubahan	
	(Rp. 195.688.411.504,53)	b. Realisasi	<u>Rp. 837.382.613.345,65</u>	
	Selisih lebih		Rp.1.033.071.024.850,18	
(4)	Selisih Anggaran dengan Realisasi	Penerimaan Pembiayaan	sejumlah	
	Rp. 0,00	dengan rincian	sebagai berikut:	
a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	setelah perubahan	Rp.	
	196.010.911.504,53	b. Realisasi	<u>Rp. 196.010.911.504,53</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		Rp.	0,00
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi	pengeluaran pembiayaan	sejumlah	Rp.
	0,00	Dengan rincian	sebagai berikut:	
a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	setelah perubahan		
			Rp. 322.500.000,00	
b.	Realisasi		<u>Rp. 322.500.000,00</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		Rp.	0,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi	pembiayaan netto	sejumlah	Rp.
	0,00	dengan rincian	sebagai berikut :	
a.	Anggaran Pembiayaan netto	setelah perubahan	Rp.	
	195.688.411.504,53	b. Realisasi	<u>Rp. 195.688.411.504,53</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		Rp.	0,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp.	196.010.911.504,53
b.	Penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	196.010.911.504,53
c.	Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	1.033.071.024.850,18
d.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	1.033.071.024.850,18

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	3.608.739.136.960,76
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	51.784.111.052,36
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	3.556.955.025.908,40

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Laporan Operasional	Rp.	2.298.171.347.599,06
b.	Beban	Rp.	1.207.541.343.097,79
c.	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(Rp.	63.968.790.888,44)
d.	Pos Luar Biasa	(Rp.	236.476.145,00)
e.	Surplus Laporan Operasional	Rp.	1.026.424.737.467,84

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari 2019	Rp.	196.010.911.504,53
b.	Arus Kas dari aktiva operasi	Rp.	1.147.968.715.348,83

c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan (Rp. 310.908.602.003,18)	
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2019	Rp. 1.033.071.024.850,18

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp. 2.456.713.639.059,39
b. Surplus laporan operasional	Rp. 1.026.424.737.467,84
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp. 73.816.649.381,17
d. Ekuitas akhir	Rp. 3.556.955.025.908,40

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang
Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan

Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran

Berikutnya;

- t. Lampiran XX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
 - u. Lampiran XXI : Data Pegawai;
 - v. Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, dan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. Laporan kinerja; dan
 - b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 12 Juni tahun 2020.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada
tanggal 27 Agustus 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu pada
tanggal 27 Agustus 2020

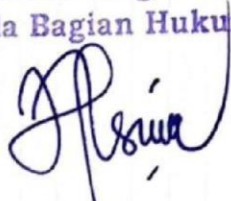
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas